



Pernyataan Penutupan Misi

Thomas Andrews

**Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Hak Asasi Manusia
di Myanmar**

Jakarta, Indonesia

21 Juni 2023

Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat mengunjungi Indonesia dalam kapasitas saya selaku Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan hak asasi manusia di Myanmar.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Indonesia yang telah bersedia menerima kedatangan saya di negara ini. Saya merasa terhormat dapat bertemu dengan Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kantor Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Satuan Tugas Pengungsi Nasional. Saya juga senang dapat bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN (AICHR), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan anggota DPR. Selama perjalanan saya, saya juga berkesempatan untuk mengunjungi Aceh, dan bertemu dengan para pengungsi Rohingya dari Myanmar yang tiba dengan kapal dari Cox's Bazar di Bangladesh, dan juga dengan pemerintah setempat.

Saya juga berterima kasih kepada para pembela hak asasi manusia, perwakilan masyarakat sipil, dan pejabat PBB yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya dan berbagi perspektif berharga tentang krisis di Myanmar serta dampaknya terhadap kebijakan Indonesia dan ASEAN dalam menghadapi krisis tersebut.

Saya datang ke Indonesia karena situasi hak asasi manusia di Myanmar begitu memprihatinkan dan semakin memburuk, dan saya percaya bahwa Indonesia memiliki posisi yang tepat untuk mengambil peran penting dalam upaya penyelesaian krisis ini.

Pengalaman saya selama berada di Indonesia semakin memperkuat pandangan ini, bukan hanya karena Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun ini, tetapi juga karena pentingnya peranan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Indonesia adalah anggota G20, memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan merupakan negara demokrasi yang mapan. Negara-negara anggota PBB memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki peran sentral dalam mengatasi krisis di Myanmar.

Rakyat Indonesia paham betul tentang tantangan dan keberhasilan saat bertransisi dari pemerintahan otoriter menuju demokrasi. Saya berada di sini pada tahun 1998, dan menjadi saksi mata atas sebuah momen penting dalam sejarah Indonesia. Yang paling mengesankan dan menginspirasi saya adalah peran yang dimainkan oleh kaum muda dalam Reformasi. Saya menyaksikan bagaimana mereka mempertaruhkan segala-galanya untuk memobilisasi mahasiswa di kampus-kampus dan di jalan-jalan. Dan saya menyaksikan generasi yang lebih senior turun ke jalan dalam jumlah besar untuk mendukung mereka. Keberanian dan kegigihan mereka memainkan peran penting dalam mengantarkan era baru bagi negara besar ini.

Saat ini di Myanmar, seperti halnya di Indonesia beberapa generasi yang lalu, generasi mudalah yang maju untuk memimpin gerakan nasional untuk keadilan, demokrasi, dan kebebasan. Banyak dari para pemimpin generasi baru ini adalah perempuan. Saya bertanya kepada salah satu dari mereka mengapa ia mempertaruhkan segalanya untuk perjuangan ini. Ia menjelaskan bahwa selama jendela reformasi telah terbuka - reformasi yang sekarang ingin dibatalkan oleh junta - ia melihat apa yang mungkin saja bisa terjadi. Ia dapat berbicara dengan bebas dan mendapat kesempatan untuk mengenal gagasan dan budaya baru. Yang terpenting, ia berani untuk menaruh harapan dan bermimpi tentang Myanmar Baru. "Orang tua dan kakek-nenek saya menceritakan bagaimana rasanya hidup di bawah kediktatoran militer," jelasnya, "dan, saya bisa pastikan, kami TIDAK akan kembali ke masa kelam itu!"

Situasi di Myanmar

Kegelapan adalah gambaran yang tepat untuk mendeskripsikan kondisi di Myanmar saat ini. Sejak junta militer melancarkan kudeta:

- Lebih dari 3.000 warga sipil telah dibunuh oleh militer Myanmar;
- 19,000 tahanan politik berada di balik jeruji besi;
- Lebih dari 58.000 rumah, sekolah, dan klinik telah dibakar habis;
- Lebih dari 1,5 juta orang telah mengungsi dari rumah mereka, dengan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi dengan melintasi perbatasan internasional.

Ketika junta kehilangan kendalinya di darat, mereka semakin sering melancarkan serangannya lewat udara, melakukan serangan udara ke sasaran-sasaran sipil, termasuk desa-desa, sekolah-sekolah, klinik-klinik, dan kamp-kamp pengungsian. Saya secara teratur menerima laporan tentang pembantaian, penyiksaan, pemenggalan kepala, kekerasan seksual, penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia, dan banyak pelanggaran berat lainnya. Segalanya buruk dan semakin memburuk.

Saya khawatir bahwa krisis yang semakin parah di Myanmar menjadi tidak terlihat oleh sebagian besar dunia, dan beberapa pemerintah mulai menganggap bahwa rezim junta adalah sebuah hal yang tak terelakkan. Narasi semacam inilah yang justru diharapkan dan dibutuhkan oleh pihak junta untuk menang. Saya yakin bahwa hal seperti ini pernah menjadi pandangan banyak orang saat berbicara tentang rezim Suharto sebelum orang Indonesia membuktikan

bahwa tidak ada yang tak terelakkan sama sekali tentang rezim tersebut, dan masa depan demokrasi yang baru adalah hal yang mungkin terjadi.

Saya percaya bahwa krisis di Myanmar telah mencapai titik balik yang penting dan sudah saatnya masyarakat internasional mengkaji ulang pendekatannya terhadap krisis tersebut. Langkah ini harus dimulai dengan pengakuan bahwa tindakan kita saat ini dalam menghadapi krisis di Myanmar tidak berhasil dan bahwa perubahan arah sangatlah penting. Perubahan ini akan membutuhkan visi dan kepemimpinan, dan saya percaya bahwa Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk menjadi pemimpin dan dapat membantu membuka jalan ke depan demi mengakhiri mimpi buruk yang dialami oleh jutaan orang di Myanmar.

ASEAN dan Kepemimpinan Indonesia

Ketika kudeta terjadi di Myanmar, Indonesia dengan segera menyatakan keprihatinannya dan menyerukan agar prinsip-prinsip demokrasi dan hukum konstitusional ditegakkan. Indonesia kemudian mendorong diadakannya pertemuan darurat ASEAN untuk menangani krisis Myanmar dan menjadi tuan rumah pertemuan tersebut di Jakarta. Di sinilah Konsensus Lima Poin lahir, dengan poin pertamanya adalah penghentian kekerasan di Myanmar dengan segera. Dalam pidatonya di akhir pertemuan, Presiden Jokowi menggambarkan situasi di Myanmar sebagai "situasi yang tidak dapat diterima" dan menyerukan kepada militer untuk mengakhiri penggunaan kekerasan, membebaskan tahanan politik, dan memulihkan demokrasi.

Konsensus Lima Poin baru saja ditandatangani ketika Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang baru saja menyetujuinya, kembali ke Myanmar dan dengan sinis menolaknya sebagai "saran" belaka. Alih-alih menghentikan kekerasan, seperti yang telah disepakati dalam Konsensus Lima Poin, Min Aung Hlaing malah mengescalasi kekerasan. Pasukan keamanan diperintahkan untuk menembaki para demonstran yang tidak bersalah. Jumlah korban tewas semakin bertambah.

Sejak awal, Min Aung Hlaing dan junta militer Myanmar telah berusaha untuk menghalangi dan mengacaukan Konsensus Lima Poin.

Presiden Jokowi bersikap blak-blakan mengenai status Konsensus Lima Poin, dengan menyatakan bahwa "tidak ada kemajuan yang signifikan" dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut dan memperingatkan bahwa "kredibilitas dan relevansi ASEAN dipertaruhkan" dalam menanggapi krisis tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, "ASEAN harus bergerak maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar."

Junta telah berhasil terus menghalang-halangi Konsensus Lima Poin tanpa hukuman berarti. Presiden Widodo mengusulkan agar memperpanjang masa larangan ASEAN terhadap partisipasi junta dalam pertemuan-pertemuan ASEAN diperluas di luar KTT ASEAN dan pertemuan para Menteri Luar Negeri. Sayangnya, negara-negara ASEAN lainnya menolak usulan ini. Dalam KTT November lalu, para pemimpin ASEAN menyerukan "peninjauan lebih lanjut" terhadap perwakilan Myanmar dalam pertemuan-pertemuan dan pembuatan rencana implementasi Konsensus Lima Poin yang terkait dengan "indikator-indikator yang dapat diukur dengan jangka

waktu tertentu." Lebih dari enam bulan kemudian, "peninjauan lebih lanjut" ini belum terjadi dan belum ada kemajuan dalam pengembangan rencana implementasi ini.

Saya sangat prihatin dengan partisipasi Myanmar yang terus berlanjut dalam pertemuan-pertemuan formal pertahanan ASEAN. Misalnya, ASEAN telah menunjuk Jenderal Tun Aung, Panglima Tertinggi Angkatan Udara Myanmar, sebagai Ketua Konferensi Kepala Staf Angkatan Udara ASEAN tahun 2023. Jenderal Tun Aung adalah komandan yang bertanggung jawab atas serangan terhadap desa-desa di Myanmar dengan pesawat tempur dan helikopter tempur - serangan yang semakin intensif dan ganas; serangan yang sangat mungkin termasuk dalam kejahatan perang. Jenderal ini dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa. Dan, bulan lalu, Panglima Angkatan Laut junta, Moe Aung, ditunjuk untuk memimpin Pertemuan Kepala Angkatan Laut ASEAN 2024. Moe Aung juga mendapat sanksi dari Uni Eropa. Junta terus menjadi ketua bersama Kelompok Kerja Pakar Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (ADMM-Plus) tentang Kontra Terorisme dengan Rusia, dan Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan ini.

ASEAN membela hal ini dengan mengklaim bahwa pertemuan tersebut hanya bersifat teknis dan tidak melanggar larangan atas keterlibatan Myanmar di level politik untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Hal ini tidak dapat diterima. Junta tidak boleh diundang untuk menghadiri pertemuan ASEAN mana pun. Setidaknya, ASEAN tidak boleh mengizinkan personel militer Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini atau pertemuan pertahanan lainnya. Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan, bersama negara-negara ASEAN lainnya dan tidak hadir jika undangan ke junta militer tidak dibatalkan.

Tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya merusak kredibilitas ASEAN tetapi juga berfungsi untuk melegitimasi junta dan memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar.

Saya mendapat kesan bahwa ada dua zona waktu yang berbeda dalam hal ASEAN dan krisis di Myanmar: pertama, realitas rakyat Myanmar yang setiap hari menghadapi serangan dari pasukan junta dan kondisi mereka yang semakin lama semakin memburuk. Yang kedua adalah para petinggi ASEAN yang memperingatkan bahwa kemajuan bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Rakyat Myanmar tidak memiliki waktu puluhan tahun. Mereka membutuhkan tanggapan internasional yang kuat terhadap krisis yang dilakukan di "zona waktu" yang sama dengan serangan brutal yang mereka derita. Mereka membutuhkan kepemimpinan yang diperlukan untuk membentuk respon internasional yang efektif, berprinsip, dan mendesak terhadap krisis ini. Karena itu kita perlu menuntut pertanggungjawaban junta yang telah menyandera Myanmar.

Upaya Indonesia untuk memajukan Konsensus Lima Poin melalui keterlibatan dan pertanggungjawaban menghadapi dua hambatan utama: yaitu junta, yang terus menolak untuk mematuhi Konsensus Lima Poin; dan sekarang adalah sekelompok pemerintah yang baru saja mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan perwakilan junta, yang dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu melegitimasi junta dan merongrong persatuan ASEAN.

Melegitimasi junta militer yang terus menerus menyerang rakyatnya merupakan pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar dan sebuah kesalahan besar. Sudah saatnya untuk mempertimbangkan opsi-opsi alternatif untuk memecahkan persoalan yang telah menjadi kebuntuan yang mematikan. ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menuntut pertanggungjawaban junta atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pengabaian terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin. Bahkan jika ASEAN tetap menemui jalan buntu, saya mendesak agar Indonesia untuk menghubungi negara-negara yang mendukung rakyat Myanmar dan terlibat dalam tindakan terkoordinasi yang bertujuan untuk mengisolasi junta dan mengurangi kapasitasnya dalam menyerang rakyat Myanmar. Ada banyak negara dan saya yakin mereka akan berdiri bersama Indonesia dengan mengerahkan sumber daya yang besar untuk mengakhiri kekerasan.

Bantuan kemanusiaan

ASEAN terus mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana (atau AHA Centre), yang menyalurkan bantuan melalui junta. Saya menyampaikan keprihatinan saya kepada para pejabat Indonesia dan ASEAN bahwa junta mempersenjatai pengiriman bantuan. Junta secara sistematis menolak pengiriman bantuan kepada penduduk yang mengungsi dan masyarakat di daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok oposisi. Hal ini berarti bantuan tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

Sungguh tak terbayangkan oleh saya bahwa di tengah kehancuran akibat Topan Mocha, bahkan saat kita sedang membicarakannya, pihak junta justru mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan agar tidak sampai ke tangan orang-orang yang sangat membutuhkan di bagian barat Myanmar. Tindakan tercela ini menunjukkan kepada Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang junta dan prioritasnya. Mengikuti pola yang sudah usang dalam mempersenjatai bantuan, junta telah mencabut izin perjalanan bagi para aktor kemanusiaan, termasuk seluruh badan PBB, ke Negara Bagian Rakhine dan mereka menuntut agar pasokan bantuan diserahkan oleh pasukan junta, yang menempatkan prioritas politiknya di atas kebutuhan mereka yang terkena dampak topan.

Saya mendesak Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN, untuk mempertimbangkan semua opsi yang tersedia guna menyalurkan bantuan kepada pihak yang paling membutuhkan, termasuk para pengungsi internal dan penduduk di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pihak oposisi. Dengan bekerja sama dengan organisasi lokal dan jaringan masyarakat sipil, bantuan dapat diberikan secara langsung kepada komunitas-komunitas ini.

Pengungsi Rohingya

Etnis minoritas Muslim Rohingya adalah salah satu kelompok yang paling teraniaya di dunia. Mereka tidak memiliki hak-hak di Myanmar, termasuk hak kewarganegaraan, kebebasan bergerak, dan bahkan hak untuk mengidentifikasi diri sebagai Rohingya. Penderitaan Rohingya

yang luar biasa termasuk serangan genosida pada tahun 2016 dan 2017 ketika militer Myanmar, di bawah komando Jenderal Senior Min Aung Hlaing, melancarkan serangan brutal tanpa henti ke desa-desa Rohingya di Negara Bagian Rakhine, yang menyebabkan lebih dari 700.000 orang mengungsi ke perbatasan Bangladesh.

Rohingya tidak diserang karena apa pun yang telah mereka lakukan, tetapi karena identitas mereka dan Tuhan yang mereka sembah.

Lebih dari satu juta orang Rohingya sekarang mencoba bertahan hidup di kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak dan jorok di Bangladesh. Namun, karena dukungan kemanusiaan internasional untuk Rohingya yang tinggal di kamp-kamp ini terus menurun, kondisi di kamp-kamp tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan. Tahun lalu, Rencana Tanggap Bersama Krisis Kemanusiaan Rohingya menerima dana sebesar 322 juta dolar AS lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk menyediakan bantuan dasar yang memadai. Akibatnya, 41 persen anak-anak Rohingya mengalami pertumbuhan yang terhambat. Lebih dari setengahnya menderita anemia, begitu pula dengan 40 persen wanita hamil dan menyusui. Pada bulan April, Program Pangan Dunia (WFP) terpaksa memotong jatah makanan sebesar 17 persen. Bulan ini, pemotongan tambahan sebesar 20 persen dilakukan. Kini, warga Rohingya di Bangladesh terpaksa mencoba bertahan hidup dengan uang sebesar 0,27 dolar AS per hari. Hal ini tidak hanya menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi bagi keluarga Rohingya, namun juga meningkatkan ketegangan dan kekerasan di kamp-kamp pengungsian.

Tidak mengherankan jika lebih dari 3.500 orang Rohingya mempertaruhkan nyawa mereka di tangan para penyelundup untuk melakukan perjalanan laut yang menantang maut melintasi Teluk Benggala dan Laut Andaman tahun lalu, dan angka ini meningkat 360 persen dari tahun sebelumnya. Tahun ini, angka tersebut hampir pasti akan meningkat. Beberapa orang Rohingya yang beruntung yang selamat dari perjalanan yang sangat mengerikan itu akhirnya berlabuh di Indonesia.

Selama akhir pekan, saya melakukan perjalanan ke kamp pengungsian Rohingya di Kabupaten Pidie, Aceh. Saya merasa terpukul melihat kerentanan para pengungsi yang saya temui. Mereka melarikan diri dari kejahatan kemanusiaan di Myanmar dan menghadapi kondisi yang semakin menyedihkan di Bangladesh. Mereka membawa beban trauma yang mendalam dan hanya menginginkan kehidupan yang lebih aman dan damai. Seperti yang dikatakan seorang pemuda kepada saya:

Saya tidak punya identitas. Saya tidak pantas berada di mana pun. Yang saya inginkan hanyalah menginjakkan kaki saya di atas tanah dan berkata: "Ini adalah tempat saya, dan saya bisa hidup dengan damai di sini."

Dalam diskusi saya dengan orang-orang Rohingya, mereka menceritakan beberapa pengalaman pahit mereka di laut. Seorang wanita mengatakan kepada saya bahwa lebih dari 20 orang meninggal di atas perahunya dan mereka harus membuang mayat-mayat tersebut ke laut. Seorang wanita lain menangis ketika ia mengenang betapa sedikitnya persediaan makanan dan

air, dan bagaimana ia harus memberi anaknya air laut untuk diminum. Seorang pria bercerita tentang beberapa keluarga yang berbagi satu bawang untuk bertahan hidup selama beberapa hari.

Kisah-kisah ini kembali diulangi oleh para saksi mata dan nelayan Aceh. Seorang wanita yang bekerja di pantai ingat saat ia melihat beberapa pengungsi turun dari perahu:

*Mereka begitu kurus, lengan mereka terkulai, seperti di ambang kematian.
Hanya memikirkannya pun saya merinding.*

Di antara teror yang dihadapi Rohingya dalam perjalanan ini, tidak ada yang lebih mengerikan daripada kekerasan seksual yang meluas terhadap perempuan dan anak perempuan. Beberapa gadis muda yang tiba di Aceh hamil akibat pemerkosaan. Ada juga laporan tentang gadis-gadis muda di atas kapal yang diperdagangkan untuk tujuan pernikahan anak, dengan suami yang menunggu mereka di Malaysia. Saya mencatat tidak adanya mekanisme penyaringan yang jelas untuk para korban ini, dan tidak adanya kerangka kerja hak asasi manusia yang berpusat pada korban untuk para calon korban perdagangan orang. Para korban ini membutuhkan perlindungan dan dukungan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Yang paling penting adalah pembentukan Peraturan Presiden 125, yang memfasilitasi pendaratan yang aman bagi para pengungsi Rohingya yang tiba melalui laut. Peraturan yang sama juga memastikan Rohingya yang tiba di Indonesia tidak ditempatkan di rumah detensi imigrasi.

Saya terinspirasi oleh kepedulian dan simpati terhadap Rohingya yang diungkapkan oleh banyak orang yang saya temui. Para nelayan Aceh bercerita tentang komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan tekad mereka untuk membantu semua orang yang mengalami kesusahan di laut. Saya terkesan dengan organisasi masyarakat sipil Aceh yang bekerja tanpa kenal lelah untuk memberikan layanan dukungan kepada para pengungsi. Beberapa di antaranya telah memperluas program mereka, termasuk pendidikan untuk anak-anak, dan bekerja untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat lokal Aceh. Saya terdorong oleh sistem rujukan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan provinsi serta dikelola oleh tenaga kesehatan lokal dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Program-program ini memastikan Rohingya menerima pemeriksaan kesehatan pada saat kedatangan dan memiliki akses ke layanan kesehatan dasar. Saya juga mengetahui adanya inisiatif penting dari dinas sosial Indonesia yang memberikan dukungan dan layanan bagi perempuan dan anak perempuan Rohingya yang menghadapi kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dalam perjalanan mereka ke Indonesia.

Saya menyambut baik kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lainnya serta badan-badan PBB, termasuk IOM, yang memungkinkan para pengungsi, setelah melalui serangkaian prosedur, untuk pindah dari lokasi pengungsian ke lokasi-lokasi akomodasi yang

didukung oleh IOM, sehingga anak-anak dapat memperoleh hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.

Meskipun ini semua merupakan inisiatif yang penting, masih ada banyak tantangan bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia. Beberapa pengungsi diharuskan untuk tinggal di kamp pengungsian selama berbulan-bulan. Kamp-kamp ini seringkali tidak memiliki sarana pendidikan untuk anak-anak dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan yang komprehensif. Para pengungsi menghadapi pembatasan pergerakan. Saya juga memahami bahwa terbatasnya kemampuan untuk berpindah dari kamp ke tempat penampungan yang didukung oleh IOM disebabkan oleh kurangnya akomodasi yang tersedia. Bagi mereka yang berada di tempat penampungan yang sudah disediakan, saya mengetahui bahwa terdapat kekurangan akses untuk mendapatkan mata pencaharian dan akses pendidikan yang terbatas. Dan bagi para nelayan yang membantu mereka ketika mengalami kesulitan di laut, adanya pendekatan kriminalisasi yang menyamakan penyelamatan dengan penyelundupan menyebabkan para nelayan Aceh berhenti menyelamatkan nyawa karena takut didakwa dan dihukum atas pelanggaran penyelundupan.

Saya terdorong oleh fakta bahwa tampaknya ada kemauan politik untuk memperbaiki situasi Rohingya. Secara khusus, saya telah mengetahui bahwa ada proses yang sedang berlangsung untuk mempertimbangkan revisi Peraturan Presiden 125. Saya mendesak pemerintah untuk menggunakan kesempatan ini untuk beralih dari pendekatan kriminalisasi ke pendekatan yang memungkinkan nelayan untuk menyelamatkan nyawa tanpa takut ditangkap. Protokol yang jelas harus dibuat untuk memastikan kejelasan mengenai akses pengungsi terhadap pendidikan dan mata pencaharian, dengan alokasi anggaran yang jelas dari pemerintah pusat.

Ada kebutuhan untuk mengembangkan protokol pemeriksaan yang lebih baik bagi para pengungsi yang baru datang. Saya mendesak Indonesia untuk membuat prosedur pemeriksaan yang jelas bagi para korban perdagangan manusia dan memastikan hak para korban perdagangan manusia untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Saya juga mendesak Indonesia untuk memastikan adanya dukungan medis dan psikososial yang sistematis dan komprehensif bagi para korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Upaya-upaya tersebut akan konsisten dengan kewajiban Indonesia di bawah Protokol Palermo tentang Perdagangan Orang, yang telah diratifikasi pada tahun 2009, dan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang tahun 2015.

Patut dicatat dan disyukuri bahwa pada bulan Februari tahun ini, Konferensi Tingkat Menteri Bali Process, yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Australia, mengaktifkan kembali Mekanisme Konsultasi, yang memungkinkan koordinasi operasi pencarian dan penyelamatan, membawa perahu ke darat ke pelabuhan aman terdekat, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terdampar. Saya mendorong Indonesia untuk bekerja sama dengan mitra-mitra regionalnya untuk memastikan proses ini menjadi mekanisme penyelamatan jiwa yang bermakna sebagaimana yang telah dirancang.

Kondisi kehidupan etnis Rohingya yang melarikan diri dari genosida di Myanmar masih sangat memprihatinkan di Bangladesh. Meskipun keinginan untuk kembali ke Negara Bagian Rakhine dengan aman, bermartabat dan terjaminnya hak asasi manusia tetap kuat, sayangnya kondisi di sana tidak memungkinkan mereka untuk kembali dalam waktu dekat. Militer yang sama yang melancarkan serangan genosida terhadap Rohingya pada tahun 2016 dan 2017 kini memimpin junta militer brutal yang menyerang penduduk sipil dan terus menolak kewarganegaraan Rohingya dan hak-hak dasar lainnya.

Pengabaian terhadap pengungsi Rohingya ditambah dengan kurangnya jalur migrasi reguler dan solusi jangka panjang lainnya telah membuat mereka memiliki pilihan yang mengerikan: menghadapi kelaparan dan kekerasan di Bangladesh; kembali ke Myanmar untuk mengalami pembatasan yang ketat dan tidak memiliki kewarganegaraan serta berisiko mengalami kejahatan kemanusiaan yang lebih buruk; atau menyerahkan nyawa mereka ke tangan para penyelundup, dengan risiko pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar, termasuk risiko kematian di lautan, demi sebuah kesempatan untuk mendapatkan keamanan dan kesempatan.

Tanggung jawab atas keselamatan etnis Rohingya, serta hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi sebagai penyintas kejahatan kemanusiaan, sepenuhnya berada di tangan Myanmar. Namun, tanggung jawab ini juga meluas ke negara-negara tempat mereka mencari perlindungan dan komunitas internasional yang lebih luas.

Indonesia memiliki posisi yang tepat untuk mengambil peran kepemimpinan global terkait Rohingya. Di tingkat nasional, Indonesia harus mengembangkan strategi kesiapsiagaan yang komprehensif untuk Rohingya, karena lebih banyak perahu akan datang. Hal ini akan membutuhkan koordinasi di antara pemerintah regional dan lokal untuk memastikan kapasitas siaga yang siap digunakan dan pengembangan mekanisme koordinasi dan perlindungan.

Berdasarkan inisiatif yang kuat hingga saat ini, Indonesia juga harus mengubah narasinya sebagai negara transit dan mengembangkan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang mencakup penampungan Rohingya untuk jangka menengah dan jangka panjang.

Indonesia berada dalam posisi yang kuat untuk bertindak sebagai pemimpin-di OKI, ASEAN, dan di kancah internasional lainnya-untuk mengadvokasi solusi jangka panjang bagi krisis yang dihadapi Rohingya. Hal ini termasuk dengan memberikan kontribusi yang besar terhadap program-program penyelamatan nyawa dan mendorong adanya dukungan yang berkelanjutan dari pihak-pihak lain. Tahun lalu, hanya satu dari 57 negara OKI yang menyumbangkan dana untuk Rencana Tanggap Bersama Krisis Kemanusiaan Rohingya. Hal ini harus diubah.

Kesimpulan

Kita berada di titik balik dalam krisis di Myanmar dan krisis yang berdampak pada Rohingya di Myanmar, Bangladesh, dan sekitarnya. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi komunitas internasional untuk mengkaji ulang tindakannya saat ini atau, dalam beberapa kasus, tidak bertindak sama sekali dan menempa jalan baru ke depan bersama dengan mereka yang

nyawanya terancam. Diperlukan kepemimpinan yang berprinsip, kepemimpinan yang dapat diberikan oleh Indonesia, tidak hanya untuk kawasan ini, tetapi juga untuk dunia.

Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mengundang saya untuk mengunjungi negara yang luar biasa ini. Saya berharap dapat melanjutkan hubungan saya dengan Anda dan komunitas masyarakat serta organisasi yang memiliki komitmen yang sama untuk memajukan hak asasi manusia dan keadilan di Myanmar.

Terima kasih.